

---

## Peran ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific* Sebagai Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Di Kawasan Indo-Pasifik

<sup>1</sup> Ely Nurmawati, <sup>2</sup> Chandra Purnama, <sup>3</sup> Wawan Budi Darmawan  
Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran  
Email: <sup>1</sup>ely18001@mail.unpad.ac.id, <sup>2</sup>cpurnama@rocketmail.com,  
<sup>3</sup>wawan.budi.darmawan@unpad.ac.id

---

### Keywords:

ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, Indonesia's Foreign Policy, Perspective Strategy

### ABSTRACT

The purposes of this paper is to see the role of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific as Indonesia's foreign policy strategy in context to responding the dynamics that occur in the region. Nowadays, competition between global actors is getting stronger and creates new, more complex tensions. One of them is marked by the increasing impact of the rivalry that occurs between the United States and China in the Indo-Pacific region. Indonesia, with its strategic position, take advantage of ASEAN as a medium to achieve its interests through a soft power approach. This paper uses the concepts of foreign policy in perspective strategy and rivalry interstate with a descriptive qualitative research approach. The results of the study describe the process from the creation and the importance of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific for countries in the region.

---

### A. PENDAHULUAN

Secara geografis, kawasan ini memiliki posisi strategis yang bernilai ekonomi dengan menjadi penghubung antar kekuatan negara besar dunia, seperti AS, Jepang, Rusia, Cina, serta negara-negara anggota ASEAN. Sekitar 20% dari total 73,56 juta mil persegi permukaan laut bumi termasuk bagian dari kawasan ini yang merupakan gabungan dari wilayah di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik (Michel and Sticklor 2012:9). Letak geografis tersebut menjadikan kawasan ini berperan signifikan sebagai penyedia rute pelayaran internasional yang strategis (Karim 2017). Salah satunya yaitu sebagai jalur perdagangan yang bernilai sekitar 32,2 juta barel minyak mentah per tahun dan menjadi sumber ekspor global senilai 40% dari sumber daya mineral (Tertia and Perwita 2018).

Di era globalisasi dewasa ini, dinamika yang terjadi antar berbagai aktor global semakin meningkatkan ketegangan dalam hubungan antar negara di kawasan sepanjang Samudera Hindia dan Samudera Pasifik untuk saling berkompetisi memperebutkan pengaruh hegemoni kekuasaan. Ditandai dengan munculnya perluasan konsep terminologi dari Asia-Pasifik menjadi Indo-Pasifik. Hal ini diperjelas dengan adanya penggunaan istilah '*Indo-Pacific Strategy*' oleh seorang *Marine Strategist and Executive Director of The New Delhi National Marine Foundation* (Khurana 2007) yang mengacu pada

cakupan wilayah maritim samudera Hindia dan Pasifik Barat, juga daerah pesisir negara-negara di Asia (di antaranya negara-negara Asia Barat/Timur/Tengah) dan Afrika Timur (Chen, 2018). Adapun penggunaan istilah ini pertama kali digunakan pada Agustus 2007 dalam pidato Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, di forum *Quadrilateral Security Dialogue* (QSD) (Abe, 2007).

QSD merupakan sebuah kelompok kerja sama yang digerakkan oleh Australia, AS, Jepang, dan India dengan berfokus pada permasalahan keamanan militer dan politik kawasan. Terbentuknya QSD merupakan respons AS akibat kekhawatiran hadirnya Cina sebagai kekuatan baru di kawasan Indo-Pasifik atas keberhasilan strategi kebijakan luar negeri *Belt and Road Initiative* (Saha 2018). Keberhasilan di bidang ekonomi ini berdampak pada meningkatnya kekuasaan Cina di kawasan. Disamping itu, Cina juga memperluas dominasinya secara militer di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Hal tersebut menimbulkan perspektif ancaman terhadap stabilitas keamanan kawasan.

Indo-Pasifik semakin menjadi pusat perhatian sejak 2016 setelah diumumkannya konsep *Free and Open Indo-Pacific* oleh Jepang. Konsep ini bersumber pada adanya permasalahan keamanan, ekonomi, dan maritim. Pada tahun 2017, Amerika Serikat (AS) melalui Presiden Donald Trump, secara resmi mendeklarasikan *Indo-Pacific Strategy* dalam kebijakan *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) AS. Kebijakan ini merupakan visi AS dan komitmennya untuk membentuk wilayah Indo-Pasifik yang aman, sejahtera, dan bebas dengan menguntungkan semua negara (The Department of Defense 2019). Disisi lain, terbentuknya FOIP AS sebagai respons atas BRI Cina telah membentuk hubungan rivalitas antar kedua negara tersebut di kawasan Indo-Pasifik.

Hadirnya aktor negara *superior* berdampak pada terbentuknya hubungan rivalitas antara AS dan Cina di kawasan Indo-Pasifik, dan berpotensi menjadi keuntungan atau ancaman. Bagi ASEAN, berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi berpotensi mengancam terjadinya destabilisasi kawasan dan keutuhan ASEAN. Adanya perbedaan kedekatan pada masing-masing negara anggota ASEAN berbanding lurus dengan perbedaan kecenderungan arah dukungan yang diberikan. Walaupun demikian, ASEAN dituntut untuk bersikap sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan mempertahankan netralitasnya dengan tanpa memihak pada salah satu kekuatan.

Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia berkeinginan stabilitas kawasan Indo-Pasifik tetap terjaga. Dengan adanya hubungan rivalitas antara AS dan Cina, akan berdampak pada efektifitas setiap kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini kemudian membentuk persepsi bahwa dibutuhkan langkah strategi kebijakan tertentu sebagai upaya mengatasi efek yang ditimbulkan akibat hubungan rivalitas tersebut, yaitu dengan tetap dapat melakukan hubungan kerja sama yang bersifat menguntungkan, tanpa terikat untuk memihak salah satu pihak.

Akan tetapi, kapabilitas yang dimiliki Indonesia di kawasan Indo-Pasifik belum memungkinkan untuk mengatasi dinamika ini secara sendiri. Langkah strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah dengan melibatkan ASEAN. Upaya ini dapat berperan ganda, yaitu terhadap terciptanya kestabilan di kawasan Indo-Pasifik dan terhadap netralitas untuk menjaga keutuhan ASEAN. Sikap netralitas dibutuhkan dalam mempertahankan keamanan regional serta peran dan eksistensi Indonesia melalui ASEAN di kawasan Indo-Pasifik. Upaya tersebut yaitu dengan membawa perspektif tentang Indo-Pasifik pada tingkat Asia Tenggara melalui ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific*.

## **B. METODE**

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Yaitu, menjelaskan bahwa tipe permasalahan yang dimaksud dengan tepat sebenarnya berkaitan dengan *providing in-depth understanding* (Cresswell 2013). Jenis penelitian

deskriptif digunakan dalam penulisan ini untuk menganalisa data serta membandingkannya dengan teori yang sudah ditentukan.

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Yaitu, sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara maupun diambil dari informasi secara tidak langsung oleh sumbernya. Penulis mengumpulkan data sekunder yang dikelompokkan ke dalam tema:

1. Rivalitas antara AS dan Cina di kawasan Indo-Pasifik;
2. Peran dan strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia melalui ASEAN; dan
3. Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia di kawasan Indo-Pasifik.

Data tersebut kemudian diolah dan dianalisa menggunakan teknik triangulasi berupa *check and re-check* terhadap sumber data, teori, dan metode sebagai uji validitas keseluruhan penyajian data.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN / RESEARCH FINDING AND DISCUSSION

#### Perspektif Strategi dalam Kebijakan Luar Negeri

Dalam perspektif strategi, fokus analisis kebijakan luar negeri adalah pola keberlanjutan dan perubahan dalam strategi kebijakan luar negeri yang dijelaskan dalam hal tujuan strategis oleh *policy makers* dengan berdasar pada kalkulasi rasional yang dipengaruhi oleh faktor (Lovell 1970) :

1. Struktur Sistem Internasional.

Berfungsi untuk menggambarkan pola umum terkait perilaku negara dan tingkat saling ketergantungan diantara mereka. Kemunculan aktor organisasi internasional mengindikasikan adanya perubahan struktur sistem internasional yang semula bersifat bipolar menjadi multipolar.

2. Persepsi Elit.

Dipengaruhi oleh faktor-faktor:

- 1) Pengalaman sejarah.
- 2) Kapasitas sumber daya.
- 3) Kemampuan di dalam bidang teknologi dan ekonomi.

3. Kapabilitas Negara.

Kapabilitas negara berupa *power* merupakan kemampuan sebuah negara melalui tindakan sebagai refleksi atas kapabilitas yang dimilikinya (Holsti 1983) untuk mengontrol dinamisnya lingkungan eksternal melalui *output* kebijakan luar negeri suatu negara. Karakteristiknya adalah: dinamis; relatif; dan situasional maupun multidimensional. Disamping itu, dapat dilihat melalui beberapa hal, yaitu: penetapan langkah strategi; mobilisasi sumber daya; tindakan saling mempengaruhi dan kekuasaan.

4. Strategi Negara-Bangsa Lain.

Konsepsi ini merupakan sebuah argumen dalam bentuk kebijakan luar negeri yang berlandaskan pada hasil kalkulasi *policy makers* melalui dua aspek (Lovell 1970), yaitu strategi yang diambil oleh negara lain dan pertimbangan stabilitas nasional relatif negara. Diantaranya (Lovell 1970) :

- 1) *Leadership strategy*

Dilakukan dengan mekanisme persuasi dan tawar menawar oleh suatu negara dengan kapabilitas *superior* kepada negara yang diyakininya *inferior*. Walaupun demikian, kombinasi dengan cara kekerasan dapat dilakukan.

- 2) *Confrontation strategy*

Dilakukan dengan maksud memaksa negara lain untuk mengakui kapabilitas *superior* nya dengan mempertajam setiap permasalahan yang ada, dan mempersepsikan negara lain sebagai ancaman.

3) *Concordance strategy*

Dilakukan dengan berupaya agar kebijakan luar negerinya tidak menimbulkan konflik bahkan cenderung bersifat mendukung negara *superior*.

4) *Accommodation strategy*

Dilakukan dengan mekanisme yang menghindari kemungkinan terjadinya konflik. Para *policy makers* meyakini bahwa kapabilitas *superior* negara lain merupakan ancaman negaranya.

Konsep kebijakan luar negeri dalam perspektif strategi penulis gunakan sebagai dasar dalam proses identifikasi dan pertimbangan langkah strategi kebijakan luar negeri Indonesia dalam upaya mewujudkan AOIP.

### **Rivalitas Antarnegara**

Dalam konsep rivalitas, terdapat tiga komponen aspek (Diehl and Goertz 2000), diantaranya :

1) Konsistensi ruang

- a. Adanya persaingan sepasang negara (*dyadic*), yang berpotensi melibatkan negara aliansi antar kedua negara berkonflik.
- b. Adanya potensi konflik di masa depan.

2) Waktu atau durasi

- a. Rivalitas sporadis atau isolatif, yang terjadi diantara sepasang negara.
- b. Rivalitas proto, yang terdiri dari konflik berulang diantara negara yang sama.
- c. Rivalitas yang terjadi terus menerus dalam rentang waktu cukup panjang.

3) Persaingan militerisasi

Penggunaan alat-alat militer terkadang digunakan antar negara berkonflik untuk menekan aktifitas negara yang bertentangan dengan kepentingannya.

Disamping itu, interaksi persaingan dapat ditetapkan dalam beberapa indikator (Hensel 1999), diantaranya:

- 1) Kompetisi antara dua pihak dengan kepentingan yang sama.
- 2) Persepsi ancaman dan permusuhan dari kedua sisi yang menyebabkan terjadinya *balance of power*.
- 3) Dimensi waktu mengenai dampak interaksi masa lalu serta pandangan ke depan.

Konsep rivalitas antarnegara dalam artikel ilmiah ini digunakan untuk melihat aktifitas hubungan AS dan Cina di kawasan Indo-Pasifik dari tahun 2017 hingga 2021. Untuk kemudian memastikan terkait keberadaan karakteristik rivalitas strategis melalui kebijakan luar negeri yang reaksioner antara AS dan Cina di kawasan Indo-Pasifik.

### **Hubungan Rivalitas Amerika Serikat dan Cina di Kawasan Indo-Pasifik**

Adanya potensi ekonomi yang tinggi di kawasan Indo-Pasifik menjadi faktor utama bagi AS maupun Cina untuk semakin menekankan hegemoninya di kawasan ini. Dominasi perekonomian dunia serta kekuatan militer AS sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, memberikan perspektif baru bagi Cina. Salah satu upaya strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan ekspor dan menurunkan nilai tukar mata uangnya. Praktiknya, kebijakan tersebut efektif memperluas pasar Cina. Akan tetapi, dampak sebaliknya dirasakan oleh AS dan hal ini memicu terjadinya perang dagang antara AS dan Cina pada Juli 2018 (Council of Foreign Relations 2018).

Hadirnya Cina sebagai kekuatan baru melalui peningkatannya di bidang ekonomi semakin tidak bisa dihindari. Cina semakin menjadi pusat perhatian di kawasan setelah munculnya kebijakan *One Belt One Road* pada tahun 2013, yang sekarang dikenal dengan BRI. Untuk mempertahankan dan semakin meningkatkan posisinya, diperlukan lingkungan yang mendukung dan stabil. Oleh karena itu, strategi lain yang dilakukan Cina adalah menjadikan negara tetangganya sebagai teman dan mitra, serta memberikan bantuan investasi untuk perkembangan negara tersebut. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasikan potensi persepsi bahwa kebangkitan Cina merupakan ancaman bagi negara lain.

Pada Otober 2017 dalam Kongres Nasional ke-19 di Beijing, BRI secara resmi menjadi fokus kebijakan luar negeri Cina dan dijadikan sebagai mekanisme peningkatan kerja sama serta dalam pencapaian ekonomi internasionalnya (Chatzky and McBride 2020) yang dilakukan melalui jalur sutera darat dan maritim (Chung 2018) :

- (1) Cina, Asia Tengah, Rusia, dan Eropa;
- (2) Cina dengan Teluk Persia dan Laut Mediterania melalui Asia Tengah dan Asia Barat;
- (3) Cina dengan Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Samudera Hindia;
- (4) dari Pantai Cina ke Eropa melalui Laut Cina Selatan dan Samudera Hindia; serta
- (5) dari Pantai Cina melalui Laut Cina Selatan ke Pasifik Selatan.

Adapun fokus BRI adalah (The State Council 2013) :

- 1) BRI di darat, yaitu memanfaatkan rute transportasi internasional sebagai kerangka kerja sama pada pembangunan bersama Jembatan Tanah Eurasia baru dan Cina-Mongolia-Rusia, koridor ekonomi Cina-Asia Tengah-Asia Barat dan Semenanjung Cina-Indocina.
- 2) BRI di laut, yaitu memanfaatkan pelabuhan laut utama di sepanjang jalur sebagai penghubung pada pembangunan rute transportasi yang lancar, aman dan efisien.

Sedangkan tujuan utama BRI adalah memperkuat kerja sama dalam bidang (The State Council 2013) : koordinasi kebijakan; konektivitas fasilitas; perdagangan bebas hambatan; integrasi keuangan; dan keterikatan orang-ke-orang. Sederhananya, BRI merupakan representasi dari *road map* integrasi Cina dengan ekonomi dunia dengan tanpa menghiraukan batas-batas negara.

Merespons fenomena tersebut, AS menyadari bahwa kompetisi maupun rivalitas di kawasan Indo-Pasifik akan tetap terus berlangsung. Fenomena kecenderungan penurunan dominasi AS di kawasan Indo-Pasifik berbanding lurus dengan penurunan kepentingan nasional yang bersifat global serta memiliki signifikansi secara strategi dan konsekuensi secara ekonomi (US National Security Council 2018). Persepsi ini memposisikan Cina sebagai rival dan ancaman yang kemudian dituangkan dalam kerangka strategis Indo-Pasifik AS (US National Security Council 2018), diantaranya :

- 1) Mempertahankan nilai strategis AS dan mempromosikan nilai tatanan ekonomi liberal di kawasan Indo-Pasifik, serta memperluas bidang kerja sama terkait perdamaian dan kemakmuran regional.
- 2) Memastikan keamanan bagi negara AS dan sekutunya.
- 3) Mempromosikan perdagangan yang adil dan menguntungkan semua pihak dalam kerangka memajukan kepemimpinan ekonomi global AS.

Sebagai langkah strategi, AS fokus melakukan pendekatan pada bidang utama (Office of the Spokesperson of Washington DC 2018), yaitu ekonomi, pemerintahan, dan keamanan. Pada November 2017 dalam Konferensi Tingkat Tinggi CEO APEC di Da Nang-Vietnam, Presiden AS Donald Trump, berkomitmen mewujudkan terciptanya stabilitas di kawasan Indo-Pasifik melalui kebijakan *Free and Open Indo-Pacific*.

Pada prinsipnya, visi FOIP (The Department of Defense 2019) adalah :

1. *Free Indo-Pacific*

bahwa kedaulatan semua negara dijalankan tanpa paksaan dan memiliki pemerintahan yang baik dengan hak serta kebebasan warga negara terjamin.

2. *Open Indo-Pacific*

bahwa keberlanjutan serta konektivitas di kawasan Indo-Pasifik baik akses maupun layanan dapat dirasakan semua pihak dengan kesepakatan transparansi .

Apabila dihubungkan dengan BRI, Visi FOIP diterjemahkan sebagai pesan dalam sebuah upaya mempertahankan komitmen negara-negara di kawasan untuk tidak terlibat dalam proyek BRI yang berpotensi memudarkan batas-batas negara; dan sebagai peringatan kepada Cina atas dominasinya di kawasan Indo-Pasifik maupun konflik di Laut Cina Selatan.

Pada dasarnya, prinsip dalam konsep FOIP didasarkan pada kesamaan kepentingan (*interest*) dan kesamaan nilai (*value*). Hal ini berdampak pada implementasi FOIP yang menggabungkan pemerintah dengan institusi bantuan internasional AS. Dalam kaitan tatanan regional, terbentuknya FOIP berlandaskan pada dasar saling menghormati, tanggung jawab, prioritas, dan akuntabilitas. Dasar landasan tersebut bertujuan dalam mempermudah implementasi FOIP serta sebagai langkah preventif terhadap negara yang telah terikat oleh pengaruh Cina.

**Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap rivalitas antara Amerika Serikat dan Cina melalui ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific***

Hadirnya AS di kawasan Indo-Pasifik sebagai *offshore ballancer* yang diikuti kebangkitan ekonomi Cina membuat dinamika kawasan menjadi semakin kompleks. Fenomena ini menuntut Indonesia untuk bersikap lebih aktif terhadap setiap kemungkinan potensi yang ditimbulkan. Terjalannya hubungan kerja sama dengan AS maupun Cina menjadi kebutuhan tersendiri bagi Indonesia. Di satu sisi, hadirnya Cina melalui BRI menguntungkan bagi Indonesia terkait investasi dalam perbaikan infrastruktur dan industri domestik. Akan tetapi, potensi risiko terbentuknya instabilitas di Asia Tenggara disadari tidak dapat dihindari oleh Indonesia.

Bukan tanpa sebab instabilitas ASEAN dapat terbentuk, karena kecenderungan perbedaan tiap negara anggota ASEAN yang condong pada salah satu pihak, yaitu AS atau Cina. Argumentasi ini didasarkan pada survei yang dilakukan kepada berbagai responden, diantaranya pada : sektor publik; akademisi, lembaga *think tanks* dan lembaga penelitian; serta sektor bisnis, organisasi non-pemerintah, dan media. Hasilnya menunjukkan bahwa 7 dari 10 negara anggota ASEAN cenderung memilih Cina daripada AS sebagai mitra kerja sama (Iwamoto 2020). Secara substansial, ASEAN semakin dekat dan pengaruh Cina semakin meluas. Seperti pada tahun 2016 dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri di KTT Asia Timur ke-6, para menteri ASEAN menyambut baik BRI Cina (ASEAN 2016) dan juga mendorong untuk bersinergi dengan strategi pembangunan ASEAN ke-16 antara menteri ekonomi ASEAN dengan menteri perdagangan Cina (ASEAN 2017).

Kecenderungan keberpihakan tersebut telah merepresentasikan terbentuknya kerangka peta politik baru yang berpotensi menyebabkan instabilitas keberlangsungan ASEAN. Indonesia menyadari urgensi akibat ketidakpastian tatanan regional transisional yang ditimbulkan oleh rivalitas hegemoni kekuasaan AS dan Cina (Mun et al. 2019). Sebagai langkah strategi dalam merespons rivalitas tersebut, Indonesia menginisiasi konsep *Indonesia's Perspective for an ASEAN Outlook on Indo-Pacific: Towards a Peaceful, Prosperous, and Inclusive Region* untuk disepakati oleh seluruh pimpinan negara anggota ASEAN (Kemlu RI 2019).

Konsep tersebut diupayakan oleh Indonesia melalui berbagai diplomasi dalam berbagai pertemuan formal maupun non-formal agar tercapainya konsensus ASEAN. Diantaranya : KTT ASEAN ke-32 pada 27-28 April 2018, ASEAN *Foreign Ministers' Meeting* pada 30 Juli-4 Agustus 2018 di Singapura, KTT ASEAN ke-33 pada 11-15 November 2018 di Singapura, *East Asian Summit* ke-13,

*ASEAN Foreign Ministers' Retreat* pada 17-18 Januari 2019, *Senior Officials' Meeting* pada 7 Maret 2019 di Chiang Rai, Thailand, *High-Level Dialogue on Indo-Pacific Cooperation* pada 20 Maret 2019 di Jakarta. Pada akhirnya, melalui KTT ASEAN ke-34 pada 20-23 Juni 2019 di Bangkok-Thailand, para pemimpin negara anggota ASEAN menyepakati *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) sebagai sebuah pandangan resmi ASEAN pertama mengenai konsep Indo-Pasifik (ASEAN 2019).

Disahkannya AOIP, dijadikan sebagai konsep bersama bagi negara anggota ASEAN untuk semakin meningkatkan kerja sama yang telah berjalan maupun sebagai pengembangan atas kerja sama di bidang maritim, konektivitas, pembangunan yang berkelanjutan, dan ekonomi (Medina 2020). Dalam pelaksanaannya, kerja sama tersebut didasarkan pada *ASEAN led-mechanisms*. Inisiasi AOIP oleh Indonesia merupakan tujuan dari Proyek Bersama dan secara reaktif yang dilakukan ASEAN. Pencapaian ini dapat dikatakan sebagai sebuah strategi dalam wadah yang berpotensi meningkatkan peran dan kepentingan kebijakan luar negeri Indonesia di kawasan Asia Tenggara serta Kawasan Indo-Pasifik.

Dibandingkan dengan kerangka kerja sama Indo-Pasifik terdahulu yaitu BRI Cina dan FOIP AS, AOIP mempunyai persamaan serta perbedaan. Sifat kerja sama yang bebas dan terbuka merupakan kesamaan yang dimiliki, sedangkan orientasi kebijakan merupakan perbedaannya (Ayres 2019). Pada BRI Cina dan FOIP AS, perbedaan orientasi kebijakan terbentuk dari hubungan rivalitas dalam aspek politik, ekonomi, dan militer, diantaranya :

1. Hegemoni ekonomi dapat terlihat melalui representasi implementasi pendanaan masing-masing negara. AS dalam kontrol pendanaan proyek pembangunan melalui Bank Dunia. Sedangkan Cina, dalam proyek BRI melalui Asian Investment Bank.
2. Hegemoni politik, dapat terlihat dengan merespons dinamika di kawasan. AS melalui pembentukan kerja sama bersama Australia, India, dan Jepang (*Quadilateral*) serta melakukan negosiasi dalam konflik Korea Selatan dan Korea Utara untuk mempertahankan stabilitas di Semenanjung Korea. Sedangkan Cina melalui pembentukan kerja sama multilateral CICA dan RCEP serta menjadi sponsor dalam negosiasi perdamaian antara Korea Selatan dan Korea Utara.
3. Hegemoni militer, dapat terlihat dari adanya kompetisi saling membandingkan kekuatan angkatan bersenjata serta alutsista termasuk nuklir oleh AS dan Cina.

Adapun kecenderungan terbentuknya AOIP adalah bersifat netral dengan prioritas kerja sama kedua pihak. Hal ini didasarkan pada kepentingan untuk mempertahankan stabilitas kawasan Asia Tenggara yang berbanding lurus dengan peningkatan pembangunan negara anggota ASEAN. Dapat dikatakan, AOIP merupakan bentuk realisasi inisiasi Indonesia melalui ASEAN sebagai respons terhadap rivalitas AS dan Cina di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi kolaborasi *accommodation strategy* dan *concordance strategy* dalam strategi kebijakan luar negeri Indonesia. Strategi tersebut dilakukan berdasarkan logika berpikir *rational choice* dengan basis pendekatan *soft power*. Searah dengan hal tersebut, persepsi Indonesia dan estimasi kapabilitas *inferior* Indonesia maupun ASEAN yang dibandingkan dengan kapabilitas *superior* AS dan Cina di kawasan Indo-Pasifik juga menjadi faktor utama dalam menentukan strategi kebijakan luar negeri. Argumentasi terhadap kolaborasi *accommodation strategy* dan *concordance strategy*, yaitu pada prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Prinsip ini menuntut netralitas dalam setiap hubungan kerja sama. Sikap netral dimaksud adalah dengan tetap melakukan hubungan kerja sama secara inklusif tanpa adanya isolasi atau bahkan kecenderungan pada salah satu pihak. Prinsip inilah yang dibawa oleh Indonesia pada forum ASEAN dalam mengakomodasi setiap kepentingan negara anggotanya di kawasan Indo-Pasifik

#### D. KESIMPULAN

Fenomena rivalitas yang terjadi antara AS dan Cina memicu terjadinya instabilitas regional serta berdampak pada kerja sama antarnegara di kawasan Indo-Pasifik. Di sisi lain, komitmen dan komunikasi untuk saling menjaga perdamaian di kawasan tersebut kurang diperhatikan baik oleh AS dan Cina. Bagi Indonesia, strategi kebijakan luar negeri BRI maupun FOIP memberikan dua analisa perspektif berbeda, yaitu estimasi risiko ancaman akibat pengaruh kekuasaan antara kedua negara tersebut dan potensi meningkatnya pencapaian pembangunan berkelanjutan di saat bersamaan.

Berdasarkan estimasi kapabilitas Indonesia, upaya diplomasi merupakan langkah tepat oleh para pembuat kebijakan dalam menghadapi rivalitas antara AS dan Cina di kawasan Indo-Pasifik. Dibuktikan dengan keberhasilan diplomasi serta kepercayaan negara anggota ASEAN kepada Indonesia melalui diadopsinya *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. Hal ini mengindikasikan optimisme Indonesia dalam merespons rivalitas tersebut dan sebagai representasi peran sentral dalam menjaga kawasan, perdamaian dunia, dan menjaga keutuhan ASEAN.

#### REFERENSI

- ASEAN. 2016. *Chairman's Statement of the 6th East Asia Summit Foreign Ministers' Meeting*.
- ASEAN. 2017. *AEM-MOFCOM Consultations*. Philippines.
- ASEAN. 2019. "*Asean Outlook on the Indo-Pacific*" Final. Jakarta.
- Ayres, Alyssa. 2019. "The U.S. Indo-Pacific Strategy Needs More Indian Oceans." *Council on Foreign Relations* expert brief. Retrieved August 11, 2021 (<https://www.cfr.org/expert-brief/us-indo-pacific-strategy-needs-more-indian-ocean>).
- Chatzky, Andrew, and James McBride. 2020. "China's Massive Belt and Road Initiative." *Council on Foreign Relations*. Retrieved October 10, 2021 (<https://www.cfr.org/background/chinas-massive-belt-and-road-initiative>).
- Chung, Chien peng (C P. ). 2018. "What Are the Strategic and Economic Implications for South Asia of China's Maritime Silk Road Initiative?" *Pacific Review* 31(3):315–32. doi: 10.1080/09512748.2017.1375000.
- Council of Foreign Relations. 2018. "U.S. Relations with China 1949-2021." *Council of Foreign Relations*. Retrieved October 10, 2021 (<https://www.cfr.org/timeline/us-relations-china>).
- Cresswell, John W. 2013. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. California: SAGE.
- Diehl, Paul F., and Gary Goertz. 2000. *War and Peace in International Rivalry*. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- Hensel, Paul R. 1999. "An Evolutionary Approach to the Study of Interstate Rivalry." *Conflict Management and Peace Science* 17(2):175–206.
- Holsti, K. J. 1983. *International Politics: A Framework for Analysis*. 4th ed. London: Perntice-Hall.
- Iwamoto, Kentaro. 2020. "7 of 10 ASEAN Members Favor China over US: Survey." *Nikkei Asia*. Retrieved October 12, 2021 (<https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/7-of-10-ASEAN-members-favor-China-over-US-survey>).
- Karim, Mohd Aminul. 2017. "21st Century Maritime Power-Politics in the Indian Ocean Region with Special Reference to the Bay of Bengal." XXXII(1):56–85. doi: 10.1111/pafo.12090.
- Kemlu RI. 2019. "ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Disepakati Pada KTT ASEAN Ke-34." *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. Retrieved August 21, 2021 (<https://kemlu.go.id/portal/id/read/539/view/peran-sentral-indonesia-pada-asean-outlook-on>



indo-pacific).

- Khurana, Gurpreet S. 2007. "Security of Sea Lines: Prospects for India–Japan Cooperation." *Strategic Analysis* 31(1):139–53. doi: 10.1080/09700160701355485.
- Lovell, John P. 1970. *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*. New York: Indiana University.
- Medina, Ayman Falak. 2020. "The 27th ASEAN Regional Forum: Salient Features." *ASEAN Briefing*. Retrieved August 29, 2021 (<https://www.aseanbriefing.com/news/the-27th-asean-regional-forum-salient-features/>).
- Michel, David, and Russell Sticklor. 2012. *Indian Ocean Rising : Maritime Security and Policy Challenges*. Washington D.C.: Stimson.
- Mun, Tang Siew, Moe Thuzar, Hoang Thi Ha, Termsak Chalermpanupap, Pham Thi Phuong Thao, and Anuthida Saelaow Qian. 2019. *The State of Southeast Asia : 2019 Survey Report*. Singapore.
- Office of the Spokesperson of Washington DC. 2018. "Fact Sheet : Advancing a Free and Open Indo-Pacific Region." *U.S. Mission to ASEAN*. Retrieved August 12, 2021 (<https://asean.usmission.gov/advancing-a-free-and-open-indo-pacific-region/>).
- Saha, Premesha. 2018. "The Quad in the Indo-Pacific : Why ASEAN Remains Cautious." *ORF Issue Brief* (229):12.
- Tertia, Joseph, and Anak Agung Banyu Perwita. 2018. "Maritime Security in Indo-Pacific: Issues, Challenges, and Prospects." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 14(1):77. doi: 10.26593/jihi.v14i1.2795.77-95.
- The Department of Defense. 2019. *Indo-Pacific Strategy Report*. United of States.
- The State Council. 2013. "Initiative Offers Road Map for Peace, Prosperity." *People's Republic of China* 1–23. Retrieved August 22, 2021 ([http://english.gov.cn/archive/publications/2015/03/30/content\\_281475080249035.htm%0A.](http://english.gov.cn/archive/publications/2015/03/30/content_281475080249035.htm%0A.)).
- US National Security Council. 2018. *US Strategic Framework for the Indo-Pacific*.